



LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN (PTIP) BULAN APRIL 2023



Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax. 0274 367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id

Website: www.pn-bantul.go.id

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
BULAN APRIL 2023**

HAKIM PENGAWAS BIDANG
GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Bab I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan.

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 08 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (1) dan (2);
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan Buku II (Edisi Revisi);
7. Buku IV Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor W13.U5/7/SK.KPN/PS/I/2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

B. Ruang Lingkup Pengawasan.

1. Penyiapan bahan pelaksanaan program, dan anggaran.
2. Pengelolaan teknologi informasi, dan statistik.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
4. Kinerja pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bantul
5. Monitoring dan evaluasi

C. Tujuan Pengawasan.

1. Untuk memantau pelaksanaan Program Kerja secara baik dan benar;
2. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan khususnya di Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan;

3. Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-permasalahan yang terdapat dilapangan, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindaklanjuti dan dalam mengambil keputusan;

D. Metodologi Pengawasan.

1. Memeriksa yang terkait dengan Program Kerja, Perencanaan, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Pelaporan khususnya di Bagian PTIP;
2. Melakukan pemeriksaan teknis, dokumen administratif / dokumen pendukung;
3. Melakukan pemeriksaan teknis, terhadap aplikasi, data statistik dan pelaporan;
4. Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

BAB II
HASIL PENGAWASAN

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Pengelolaan Surat masuk/ keluar	Standar checklist APM	<ul style="list-style-type: none"> - Tercatat - Terkendali - Menggunakan aplikasi - Distribusi tepat waktu 	Nihil	-	-	-
2.	Uraian tugas masing-masing	Standar checklist APM Perma no 7 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada keseluruhan - Sudah Dilaksanakan sesuai tugas masing - Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat rapat berjenjang 	Nihil	-	-	-
3.	Implementasi SOP	Standar checklist APM; Persekma No 002 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuat sesuai PerSekma No. 002 tahun 2012 (pedoman penyusunan SOP) - Sudah dilaksanakan dan tepat waktu 	Nihil	-	-	-
4.	Pengisian aplikasi	Standar checklist APM; PMK No.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti kaidah SMART 	Nihil	-	-	-

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
	monev SMART	195/PMK.05/2018 ttg monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah diisi setiap bulan - Sekretaris sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi - Capaian realiasi DIPA BUA 17,52% dan BADILUM 22,76% 				
5.	Penyusunan RKAKL	Standar checklist APM; PP No.21 Tahun 2004 (Penyusunan RKA-KL)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Aplikasi SAKTI - Telah dilaksanakan revisi pada halaman III dipa - 	Nihil	-	-	-
6.	Layanan Hukum bagi masy. Kurang mampu (perma No. 1 Thn 2014) → monev pelaporan pembebasan biaya perkara melalui aplikasi	Standar checklist APM; Perma No. 1 Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan setiap bulan menggunakan aplikasi dari badilum 	Nihil	-	-	-

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
7.	Kepatuhan backup data	Standar checklist APM; Instruksi Dirjen Badilum no. 3102/Dju/ SK/ HM.02.3/9/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Backup dilakukan setiap hari - Sinkronisasi dilakukan 3 kali sehari 	Nihil	-	-	-
8.	Aplikasi	-	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi SIPP 420 berfungsi dengan baik - Aplikasi MIS 1.5 berfungsi dengan baik - Aplikasi BIMA (Bantul Information Media Assistant) berfungsi dengan baik - Jumlah pengguna BIMA bulan Juni - Aplikasi E-Employement update dan berfungsi dengan baik - Aplikasi Kontrol Perkara berfungsi dengan baik - Aplikasi Portal aplikasi berfungsi dengan baik - Aplikasi Minut 	Nihil	-	-	-

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
			<ul style="list-style-type: none"> Putus berfungsi dengan baik - Aplikasi e-summary berfungsi dengan baik - Aplikasi e-tilang berfungsi dengan baik - Aplikasi Syarat Layanan berfungsi dengan baik - Aplikasi Antrian PTSP berfungsi dengan baik - Layar Anjungan Pelayanan Mandiri berfungsi dengan baik - Audio Gratifikasi berfungsi dengan baik 				
9.	Update Website	-SK KMA No 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan; -Keputusan dirjen Badilum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/2021;	- Memenuhi standar ceklist APM	- Nihil	-	-	-

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
		-Standar checklist APM					
10.	Laporan Nilai EIS (Evaluasi Implementasi SIPP)	<ul style="list-style-type: none"> - SK KMA 71/KMA/SK/IV/2019 Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan - Surat Dirjen Badilum Nomor: 922/DJU/HM.02.3/8/2021 perihal Revisi Nilai Aplikasi Implementasi SIPP 	<p>Total Nilai EIS Bulan April 2023 adalah 949.01</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja = 124.67 - Kepatuhan = 544.16 - Kelengkapan = 93.82 - Kesesuaian = 186.36 	Nihil	Nilai EIS tertinggi di wilayah PT Yogyakarta, ranking 30 se-Indonesia	-	-
11.	Aplikasi BIMA	SK KMA No 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman	Aplikasi BIMA telah diperbaiki dengan system yang baru.	Nihil	-	-	

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
		pelayanan informasi di pengadilan	Saat ini masih dalam tahap uji coba.				
12.	Peralatan TI pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> - PC layanan PTSP dapat berfungsi dengan baik - Monitor antrian PTSP terdapat garis-garis tetapi masih bisa digunakan 	- Nihil	-	-	-

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Pengawasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan surat masuk/keluar : tidak ada temuan
2. Uraian tugas masing-masing: tidak ada temuan
3. Implementasi SOP: tidak ada temuan
4. Pengisian Aplikasi SMART: tidak ada temuan
5. RKAKL : TA 2023 indikatif sudah diajukan. tidak ada temuan.
6. Laporan pelaporan pembebasan biaya perkara melalui aplikasi sudah dilaksanakan di kepaniteraan Hukum.
7. Kepatuhan backup data: tidak ada temuan
8. Standarisasi website: telah termonitor; tidak ada temuan
9. Aplikasi : tidak ada temuan
10. Nilai EIS bulan April 2023 adalah 949.01meningkat dari bulan Maret 2023 (939.46).
Secara peringkat nilai EIS menjadi peringkat pertama di wilayah PT Yogyakarta.
11. Aplikasi BIMA : tidak ada temuan
12. Peralatan TI utk pelayanan: tidak ada temuan

Bantul, 05 Mei 2023
Hakim Pengawas PTIP



GATOT RAHARJO, S.H., M.H.
NIP. 198308282009041006